

Rumah Joglo di Makam Leluhur Gus Dur

SALATIGA (KR) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Salatiga menyelesaikan pembangunan rumah joglo (pendapa) di kompleks makam Mbah Wahid di Kelurahan Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Rumah joglo pendapa tersebut dibiayai APBD Salatiga sebesar Rp 250 juta dan saran penunjang lainnya yang totalnya kurang lebih Rp 650 juta termasuk toilet. Diketahui, makam ini merupakan makam leluhur kakek buyut Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Rumah joglo ini diharapkan bisa membuat pengunjung (peziarah) untuk beristirahat dan lebih nyaman. Dari data yang dihimpun KR dari DPKP Salatiga disebutkan hingga akhir tahun 2022, untuk penataan sarana makam ini telah menghabiskan anggaran Rp 1, 019 miliar. Penataan kompleks makam leluhur Gus Dur yang juga dikenal sebagai ulama besar NU ini dilakukan DPKP Salatiga secara bertahap mulai 2020 lalu.

Pada 2020, dinas menata makam Mbah Wahid dengan pekerjaan pembangunan talud dan gapura sebesar Rp 174 juta, kemudian dilanjutkan pada tahun 2021 dengan melakukan pembangunan pagar dan talud senilai Rp 195 juta dan pada tahun 2022, Dinas PKP menyelesaikan pembangunan joglo pendopo, pagar, railing, dan akses difabel serta toilet untuk melengkapi fasilitas bagi pengunjung/peziarah di makam Mbah Wahid ini, totalnya Rp 650 juta.

"Dengan penataan makam Mbah Wahid ini diharapkan pengunjung yang akan berziarah dan berwisata religi lebih nyaman dan dapat meningkatkan kunjungan ziarah masyarakat ke makam Mbah Wahid," kata Kepala Dinas PKP Salatiga, Eny Endang Surtiani kepada KR, Jumat (9/12). Ia menambahkan, rumah joglo/ pendapa dan sarananya lainnya kurang lebih Rp 650 juta, namun khusus rumah joglonya Rp 250 juta. Alokasi penataan kompleks makam leluhur Gus Dur terus dilakukan agar maksimal. (Sus)-f

Bawaslu Segera Buka Panwas Desa Pemilu 2024

MAGELANG (KR) - Bawaslu Kabupaten Magelang segera membuka pendaftaran untuk perekrutan Panwas Desa Pemilu 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Habib M Shaleh mengatakan perekrutan Panwas desa akan ditangani Panwaslu Kecamatan, dan pendaftaran paling lambat dibuka bulan Januari. "Bawaslu melalui Panwaslu Kecamatan akan segera membuka pendaftaran panwas desa," kata Habib M Shaleh, ditemui di sela-sela rapat koordinasi, Sabtu (10/12).

Habib mengatakan KPU juga akan membuka pendaftaran PPS dan menjadi tugas dari Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi perekrutannya. Jadi Panwaslu Kecamatan melakukan perekrutan Panwasdesa sekaligus mengawasi perekrutan PPS. Panwaslu Kecamatan mendapat pembekalan terkait pengawasan tahapan pemilu dan perekrutan badan ad hoc. Harapan dapat memiliki pemahaman regulasi dan menjalankan tugas dengan baik.

Mantan Ketua Bawaslu Provinsi Yogyakarta Agus Sarwono mengatakan Bawaslu dan Panwaslu Kecamatan harus memiliki peta kerawanan pelanggaran di tiap tahapan pemilu. Kerawanan itu sendiri mungkin harus dicegah sehingga tidak menjadi pelanggaran. "Pelanggaran harus dicegah, jika sudah terjadi pelanggaran akan report. Menjadi tugas panwas untuk mencegah pelanggaran," katanya. Pencegahan itu, dikatakannya, diantaranya dengan sosialisasi regulasi pada masyarakat, peserta kontestasi, pendukung, partisipan, ASN, Polri, TNI dan semua pihak. (Osy)-f

Kereta Wisata Istimewa Siap Sambut Libur Nataru

SEMARANG (KR) - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) Indonesian Railway Museum (Museum Ambarawa) tetap melayani para pengunjung yang akan berlibur dan berkunjung ke Museum Ambarawa. Bahkan, menyambut pengunjung pada nataru selain dilakukan penambahan jadwal operasional perjalanan Kereta Wisata Istimewa, juga ditingkatkan fasilitas pelayanan. Hal itu diungkapkan M Ilud Siregar Humas PT KA Pariwisata, Kamis (8/12) terkait persiapan museum Ambarawa menyambut Nataru. Ilud

la menjelaskan fasilitas yang disajikan seperti hiburan live music, chocho train, ruang audio visual, kereta perustakaan, sewa scooter, sewa kostum, spot untuk foto-foto. Tujuan memberikan dan meningkatkan pelayanan serta daya tarik bagi kunjungan wisata di Indonesian Railway Museum (IRM).

Operasional kereta, menurut Ilud Siregar selain perjalanan kereta wisata secara reguler juga bisa menerima perjalanan kereta wisata dengan pola charter atau sewa. Yakni, baik menggunakan locomotive vintage bisa juga dengan locomotive uap terutama di hari-hari weekday maupun weekend. Jadwal perjalanan kereta wisata istimewa bersama Lokomotive diesel vintage reguler relasi Ambarawa-Tuntang (PP) yang biasanya ditetapkan hari Sabtu dan Minggu, namun menyambut Nataru jadwal operasional diperpanjang tiap hari pada jam kerja mulai 24-31 Desember 2022. Adapun tarif harga tiket naik kereta wisata Rp 100.000/penumpang dan waktu perjalanan relasi Ambarawa-Tuntang (PP) kurang lebih 60 Menit. "Untuk Pelayanan tiket penjualan kereta wisata pada hari H keberangkatan dimulai pukul 08.00," jelas Ilud Siregar.

Para pengunjung yang ingin menggunakan kereta wisata di Indonesian Railway Museum Ambarawa yang terdapat jalur kereta khusus, rel bergerigi wajib mematuhi protokol kesehatan ditetapkan Pemerintah. Perjalanan kereta wisata di Indonesian Railway Museum Ambarawa diharapkan dapat menjadi pilihan masyarakat untuk bisa menikmati berwisata di Indonesian Railway Museum Ambarawa tersebut dengan aman dan nyaman serta menambah pengalaman dan edukasi tentang sejarah kereta wisata di Indonesia. (Cry)-f



KR-Karyono

Kereta wisata di Museum KA Ambarawa siap membawa pengunjung keliling sejumlah tempat.

Libur Nataru, Diharap Pengunjung Bisa Naik Candi

MAGELANG (KR) - Pada musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang diharapkan pengunjung sudah mulai diizinkan untuk melakukan kunjungan dengan naik ke bangunan struktural Candi Borobudur dengan memperhatikan atau mengikuti segala Standar Operasional Prosedur atau SOP yang berlaku. "Yang kita tunggu kebijakan dari pusat," kata Camat Borobudur Subiyanto kepada wartawan usai mengikuti Borobudur Fun Run di kawasan Candi Pawon Borobudur, Minggu (11/12).

Setelah kebijakan pusat, menyesuaikan. Kebijakan Taman Wisata Candi (TWC) diharapkan untuk masyarakat menyiapkan segala sesuatunya.

Menurut Camat Borobudur, ternyata perlu hal yang sangat kompleks berkaitan dengan penyediaan. Ini seperti penyediaan alas kaki atau sandal upanath, yang setiap harinya dibutuhkan sekitar 1.200 sandal de-

ngan ukuran bervariasi. Ini merupakan manajemen tersendiri yang harus dipersiapkan.

Karena itu Camat Borobudur berharap ada metode atau konsep reservasi, sehingga beberapa hari sebelumnya sudah terdapat jumlah pengunjungnya, termasuk berapa ukuran kakinya. Sangat diharapkan adanya komunikasi yang baik antara pihak-pihak terkait, termasuk penyedia sandal. Kesempatan atau peluang ini juga dimanfaatkan untuk menyamaratakan aspek pendapatan dari Candi Borobudur, mengingat selama ini hanya radius beberapa kilometer dari Candi Borobudur yang menikmati keramaian. "Yang lebih dari itu tidak begitu banyak langsung bisa menikmati," katanya. Oleh karena itu dibangun konsep bagaimana pendapatan candi bisa merata.

Juga baru dibangun adanya Badan Usaha Milik Antar Desa Bersama (BUM-DESMA) 'Borobudur Ma-

nunggaling Rasa' tingkat Kecamatan Borobudur yang dikelola satu manajemen dengan permodalan dari semua desa. Saat ini BUMDESMA ini sedang berproses, yang diawasi kecamatan, pendamping desa dan para sekdes untuk proses administrasinya, termasuk badan hukum. Sudah ditunjuk seorang mandatori ketua.

Hingga saat ini di wilayah Borobudur ada sekitar 2 yang berproduksi sandal upanath, sedang lainnya sudah memiliki keterampilan dan masih membutuhkan pendampingan maupun peralatan. Diharapkan ada pihak-pihak tertentu ada kerjasama untuk melakukan pembinaan. Masih banyak yang membutuhkan pendampingan. Basiyo merupakan salah satu warga yang sudah berproduksi.

GM Taman Wisata Candi Borobudur (TWC Borobudur) Jamaluddin Mawardi diantaranya mengatakan saat ini pihaknya masih me-

lakukan sejumlah persiapan bersama Balai Konservasi Borobudur (BKB) hingga simulasi secara bertahap dengan menggunakan sandal upanath. Dikatakan simulasi secara terbatas sudah pernah dilakukan beberapa waktu lalu, dan juga dirancah SOP, sistem, hingga sosialisasi kepada publik. "Kami masih ada fase sosialisasi kepada publik supaya nanti yang mau ke Borobudur mengetahui bagaimana prosedurnya," katanya. Apalagi juga ada

batasan jumlah pengunjung yang akan naik ke struktur candi, yakni sebanyak 1.200 orang. Nantinya para pengunjung diwajibkan memakai sandal upanath, yang terbuat dari beberapa bahan, diantaranya daun pandan dan spons, untuk meminimalisir adanya gesekan-gesekan di bebatuan candi. Selain itu, juga bakal ada pemandu wisata yang bersertifikat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). (Tha)-f



KR-Thoha

Beberapa warga mencoba membuat sandal upanath.

SOAL PERBUP PENGISIAN PERDES

Ketua DPRD Karanganyar Tuding Eksekutif Ngawur

KARANGANYAR (KR) - Dispermasdes dan Bagian Hukum Setda Pemkab Karanganyar diklarifikasi tentang perbup pengisian perangkat desa. Pimpinan DPRD menuding perbup menyalahi aturan di atasnya.

Ketua DPRD Bagus Selo menuding perbup pengisian perdes dibuat asal-asalan tanpa mengacu perda, Permandes dan undang-undang tentang desa. Kewenangan kades yang tacerabut merupakan imbas penerapan perbup yang dianggap ngawur.

"Di aturan di atasnya (permandes, UU dan Perda) hanya mengatur untuk penyiangan dan penjarangan calon perangkat desa. Tapi kenapa di Perbup yang seharusnya mengacu dari itu malah melenceng. Ada disisipkan tentang penetapan calon perdes.

Hal ini sudah mengebiri kewenangan kades yang seharusnya punya hak memilih perdes," kata Bagus Selo, Jumat (9/12).

Bagus Selo serta para pimpinan DPRD dan pejabat pemkab memulai klarifikasi pukul 11.15 WIB. Mereka menunggu selama berjam-jam kehadiran Kabag Hukum Karanganyar Metty feriska Rajagukguk. Metty beralasan terlambat karena menghadiri kegiatan dinas di Colomadu.

Ketua DPRD Bagus Selo langsung mencecar pertanyaan hingga meminta klarifikasi Bagian

Hukum mengenai perbup seleksi perangkat desa. Perbup ini bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Desa.

Jika merujuk Perbup No 81 Tahun 2022, Kades tidak memiliki kewenangan dalam memilih perangkat desanya.

Di pasal 31 ayat 2 Perbup 81 tahun 2022, kepala desa hanya diperbolehkan menunjuk satu calon perangkat desa dengan nilai tertinggi sebagai bahan pertimbangan untuk diajukan ke camat.

Artinya penetapan calon terpilih ada di tangan camat. Padahal di dalam Perda secara gamblang diatur bahwa kewenangan Pemkab dalam hal ini camat hanya sampai proses penjarangan dan penyiangan.

Sementara Kades memiliki kewenangan dalam mengangkut, memberhentikan dan memutasi perangkat desa.

"Jenengan ini menyalahi. Tiap 4 bulan idealnya konsultasi kegiatan dinas ke dewan. Dan ini sama sekali enggak konsultasi. Motivasi anda apa. Ngejar reward?" katanya.

Dalam agenda klarifikasi itu, Kabag Hukum Setda Pemkab Karanganyar Kabag Hukum Karanganyar Metty Feriska Rajagukguk mengatakan ketidakpuasan pimpinan DPRD perihal penerapan Perbup No 81 tahun 2022 bakal disampaikan ke Bupati Julyatmono.

Ia tak bisa memutuskan sendiri untuk mencabut apalagi merevisi perbup. (Lim)-f

Peringatan HUT Ke-72 DPRD Boyolali

BOYOLALI (KR) - Sejumlah hiburan bakal meriahkan peringatan Hari Jadi Ke-72, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boyolali. Hiburan tersebut mulai dari musik legendaris Koes Plus, Pop Singer Festival serta festival band pelajar se Boyolali. Selain musik, HUT DPRD Boyolali juga akan dimeriahkan dengan pasar murah produk lokal Boyolali yang digelar selama tiga hari yakni, Jumat-Minggu (16-18/12).

Sementara pada Minggu (18/12) pagi akan dilaksanakan jalan sehat. Dalam jalan sehat itu panitia menyediakan segudang hadiah menarik seperti, 10 unit sepeda motor dan hadiah lainnya. Jalan sehat akan di mulai pada pukul 07.00 wib pagi di Alun alun Kidul dan dimeriahkan oleh Abah Lala dan Yeni Inka. Sedangkan pada Kamis (29/12) akan dilaksanakan Paripurna istimewa Hari Jadi DPRD dan dilanjutkan ke makam Ketua DPRD Boyolali pertama yakni S Dirdjo Soe-

prpto dan Ketua DPRD ke-11 S Paryanto.

Puncak acara kegiatan HUT DPRD akan digelar wayang kulit dengan Dalang Ki Sigit Arianto asal Rembang dengan lakon Bimo Suci sekaligus santunan terhadap 72 anak yatim piatu. Ketua DPRD Boyolali Marsono mengatakan, sejumlah persiapan terus dilakukan oleh lembaga legislatif untuk membuat acara yang mampu mendekatkan diri kepada masyarakat. "Kami mulai melakukan persiapan dalam pelaksanaan HUT DPRD, semoga atas kerjasama bersama teman-teman ini, pelaksanaan HUT nanti dapat berjalan dengan baik," katanya usai acara publikasi Hari Jadi DPRD Kabupaten Boyolali di lokasi Anuraga, Sabtu (10/12).

Ia berharap, masyarakat sehat dan seni budaya di Boyolali terus terjaga dengan baik. "Kegiatan seperti ini akan kita teruskan, dan semoga kedepan akan lebih baik," jelasnya.

Sementara itu, disela acara, Ketua DPRD Boyolali Marsono memberikan piagam penghargaan terha-

dap penyanyi asal Kecamatan Musuk Boyolali, yakni Agus Purwanto atau lebih akrab disapa Abah Lala. Di hadapan perwakilan para pelajar dan ketua dewan, Abah Lala mengakui bahwa di Boyolali banyak yang potensi menjadi pemusik berbakat. (R-3)-f



KR-Mulyawan

Abah Lala menghibur siswa SD dalam rangkaian publikasi HUT ke-72 DPRD Boyolali.

Kerusakan Sepanjang Sungai Bengawan Solo Didata

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo data kerusakan disepanjang aliran Sungai Bengawan Solo dan sungai lainnya untuk dikordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS). Pendataan dilakukan terkait kondisi talud, tebing sungai, pintu air, sedimentasi dan tumpukan sampah yang bisa memicu terjadinya bencana alam banjir dan abrasi sehingga membahayakan warga saat musim hujan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sukoharjo Widodo, Minggu (11/12) mengatakan, pendataan dilakukan sebagai bagian inventarisir kondisi Sungai Bengawan Solo di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Sebab Sungai Bengawan Solo melintasi beberapa desa dan kecamatan yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat setempat. Seperti saat musim hujan, luapan Sungai Bengawan Solo berdampak banjir. Selain itu juga dite-

mukan kerusakan seperti abrasi maupun talud ambrol.

Musim hujan juga berdampak pada sungai lainnya di wilayah Sukoharjo karena jadi penyebab banjir. Pendataan dilakukan secara menyeluruh dengan menginventarisir kondisi talud, tebing sungai, pintu air, sedimentasi dan tumpukan sampah. Pemkab Sukoharjo melibatkan kepala desa, camat dan organisasi perangkat daerah (OPD). Keterlibatan semua pihak dilakukan untuk mengetahui secara riil kondisi Sungai Bengawan Solo dan sungai lainnya.

"Tujuannya untuk mengetahui kondisi riil dan tingkat kerusakan serta penanganan kedepan sebagai antisipasi terjadinya bencana alam yang bisa merugikan masyarakat," ujarnya. Widodo mencontohkan, seperti kasus abrasi tebing Sungai Bengawan Solo di wilayah Desa Pojok, Kecamatan Tawang Sari. Kerusakan

parah berdampak pada warga yang terpaksa meninggalkan rumah karena pondasi tergerus aliran air. Warga harus mengungsi ke rumah anggota keluarganya yang lain agar bisa selamat.

"Kasus abrasi di Desa Pojok Kecamatan Tawang Sari itu sudah lama. Sudah diketahui dan dilaporkan tapi penanganannya yang lama hingga akhirnya warga terdampak dirugikan harus mengungsi meninggalkan rumahnya," lanjutnya. Pemkab Sukoharjo meminta dalam proses pendataan dilakukan dengan cermat. Sebab kondisi kebutuhan dan kerusakan di masing-masing wilayah disepanjang aliran Sungai Bengawan Solo berbeda. Hasil dari inventarisir ini nantinya akan disampaikan Pemkab Sukoharjo kepada BBWSBS. Hal ini dilakukan mengingat kewenangan penanganan Sungai Bengawan Solo dan sungai lainnya ditangani BBWSBS.

Pembekuk Sukoharjo berharap BBWSBS setelah menerima data secara keseluruhan dari masing-masing wilayah di Kabupaten Sukoharjo bisa segera bergerak cepat melakukan penanganan. Sebab kerusakan atau potensi bahaya bencana alam apabila dibiarkan maka akan sangat merugikan masyarakat. "Abrasi kalau segera ditangani maka bisa meminimalisir kerusakan lebih parah lagi. Seperti halnya pula sedimentasi, apabila segera dikeruk maka bisa mencegah banjir," lanjutnya.

Widodo mengatakan, dalam penanganan Sungai Bengawan Solo tidak memungkirki butuh anggaran sangat besar. Karena itu perlu dilakukan secara bertahap dengan melihat data secara skala prioritas kebutuhan. "Pemkab Sukoharjo hanya akan melakukan sesuai kewenangan. Selebihnya kami serahkan ke BBWSBS," lanjutnya. (Mam)-f